

**PERISTIWA TERBUNUHNYA MENTERI NEGARA
OTO ISKANDAR DI NATA, DESEMBER 1945
(Tinjauan Historis)**

Nina Herlina Lubis
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus 1945, R. Oto Iskandar di Nata diangkat menjadi Menteri Negara pada Kabinet Pertama RI. Dua bulan kemudian, tanggal 31 Oktober ia diculik oleh sekelompok orang dan kemudian ditemukan terbunuh pada bulan Desember 1945. Peristiwa terbunuhnya R. Oto Iskandar di Nata menarik diteliti karena sejak terbunuhnya Menteri Negara yang dijuluki Si Jalak Harupat ini, pada tahun 1945 hingga sekarang, belum pernah dapat dibuktikan siapa pembunuhnya, bagaimana latar belakang pembunuhan itu, dan bagaimana terjadinya pembunuhan itu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik ekstern dan kritik intern, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penculikan dan pembunuhan disebabkan oleh paling sedikit dua faktor. Pertama, R. Oto Iskandar di Nata dianggap kolaborator Jepang yang merugikan perjuangan pada masa revolusi. Kedua, R. Oto Iskandar di Nata mengalami konflik peranan, sebagai Menteri Negara ia wajib menjalankan kebijakan pemerintah pusat, di sisi lain ia ingin membantu para pemuda di Bandung untuk merebut senjata dari Jepang yang bertentangan dengan kebijakan pusat. Ia tak bisa mengatasi masalah ini sehingga akhirnya menjadi korban penculikan dan pembunuhan politis.

Kata kunci : Revolusi, konflik, rivalitas, pembunuhan politik

THE ABSTRACT

At the beginning of the Independence of Indonesia, in August 1945, R. Oto Iskandar di Nata was assigned to one of the State Ministers in the First Cabinet of the Republic of Indonesia. Two months later, on October 31, 1945, he was kidnapped and found killed. This incident is an interesting topic to be researched because since he, the State Minister named "Si Jalak Harupat", was killed in 1945 until now, it cannot be proved who the killer was, what the background of the political murder was, and how the murder happened. This research is conducted by the historical method consisting of four steps, namely, heuristic, external and internal critics, interpretation, and historiography. The result of the research, concludes that the murder was caused by minimally two

factors. First, R. Oto Iskandar di Nata was cooperative with the Japan military Ruler, which was considered damaging the revolution struggle.. Second, R. Oto Iskandar di Nata was experiencing a role conflict. At one side, he was a state minister who had to execute the policy of the Central Government, and at the other side, he was expected to help the young paramilitary group to take away by force the guns from the Japan Army, which was in contradiction to the policy of the Central Government. He could not get the solution for this problem, so he was kidnapped and killed.

Keywords : Cooperative, conflict, state minister

PENDAHULUAN

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengalami pemboman di Hiroshima dan Nagasaki dan tak ada pilihan lain bagi Jepang selain menyerah kepada Sekutu. Setelah Jepang menyerah, terjadilah kevakuman kekuasaan karena Sekutu belum datang untuk menerima penyerahan itu. Inilah kesempatan yang dimanfaatkan oleh para pejuang, yang pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia merdeka diproklamasikan .

Pemerintah RI yang baru saja didirikan segera menetapkan kepala pemerintahan Dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tanggal 18 Agustus 1945, diputuskan secara aklamasi, Presiden RI pertama adalah Ir. Soekarno dan wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta. Orang yang mengajukan kedua nama ini dalam sidang PPKI adalah R. Oto Iskandar di Nata, yang saat itu menjadi anggota PPKI. Tidak lama kemudian dibentuk Kabinet Pertama RI. R. Oto Iskandar di Nata diangkat sebagai salah seorang menteri negara dalam kabinet tersebut, yang bertugas mengurus keamanan.

Pada bulan Oktober 1945, R. Oto Iskandar di Nata diculik oleh kelompok orang yang tidak dikenal. Tiga orang pejabat pemerintahan daerah di Kota Bandung, ikut pula diculik. Mereka adalah Ir. Ukar Bratakusumah, Nitisumantri, dan Puradiredja. Salah seorang korban ini mengenali siapa penculik dirinya. Ketiga orang itu kembali dengan selamat setelah tiga bulan diculik, tetapi R. Oto Iskandar di Nata ditemukan terbunuh di Pantai Mauk Tangerang pada bulan Desember 1945.

Perumusan Masalah

Informasi tentang siapa penculik R. Oto, kapan, dan di mana ia diculik tidak jelas. Peristiwa terbunuhnya Menteri Negara ini, ternyata tidak diusut segera, mungkin karena situasi revolusi yang kacau tidak memungkinkan untuk itu. Baru pada tahun 1959, peristiwa penculikan dan pembunuhan ini disidangkan di pengadilan dengan tertuduh seorang polisi bernama Mujitaba. Ternyata persidangan ini pun tidak menjelaskan secara tuntas tentang peristiwa itu, oleh karena itu, masalah yang perlu dicari penjelasannya dalam penelitian ini adalah:

Mengapa R. Oto Iskandar di Nata diculik? Siapa dalang penculikannya? Mengapa pula peristiwa itu seakan dipetieskan, dan baru diusut belasan tahun kemudian?

Kerangka Pemikiran Teoretik

Suasana revolusi menciptakan rivalitas dan konflik, bukan saja antar golongan, antar kelompok, tetapi bisa juga antar pribadi. Menurut Lewis Coser,(1956) konflik terjadi karena perbedaan kepentingan. Lamanya konflik bergantung kepada faktor yang dianggap penting yang diperebutkan dalam konflik itu. Otoritas dan kekuasaan merupakan sumber langka yang menjadi penyebab kebanyakan konflik (Turner, 1978: 145, 164-172, 183-184). Bila melihat situasi revolusi, jelas bahwa orang-orang atau kelompok yang melakukan penculikan terhadap R. Oto Iskandar di Nata dan kawan-kawan adalah mereka yang mempunyai kepentingan yang berbeda dengan Menteri Negara itu.

Dalam situasi revolusi, konflik antar elite yang berkuasa, bisa terjadi secara terbuka tetapi bisa juga ditutup dengan menciptakan suatu kondisi yang serba tidak jelas. Siapa elite yang berkuasa itu? Pengertian elite menurut Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto, elite terbagi dua, yaitu *governing elite* dan *non-governing elite*. (Bottomore, 1974: 7-8; Mosca, 1939: 50) Dalam revolusi kemerdekaan yang muncul menjadi elite ini adalah para pejuang dengan latar belakang tertentu. Mereka ini ada yang menjadi pemimpin lasykar, ada yang menjadi pemimpin militer (Barisan Keamanan Rakyat) ataupun mereka yang duduk dalam pemerintahan, mereka yang disebut terakhir inilah yang dapat dikelompokkan ke dalam *governing-elite*, sedangkan lasykar adalah *non-governing elite*. Konflik bisa terjadi antara kedua kelompok ini. Elite yang duduk dalam pemerintahan berkewajiban menjalankan aturan perjanjian internasional, dalam hal ini mereka terikat untuk mematuhi perjanjian Sekutu dengan Jepang, sementara lasykar tidak ada keterikatan untuk menjaga statusquo sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan sekutu itu, sebab mereka bukanlah elite yang memerintah. Dengan perbedaan kedudukan kedua kelompok dan juga perbedaan kepentingan, maka konflik bisa terjadi.

Selain itu, konflik bisa juga terjadi antar etnik yang bersaing. Mereka berebut kepentingan untuk bisa meraih kekuasaan dalam pemerintahan yang baru ini. Di Bandung pada masa revolusi fisik ini terdapat berbagai suku dan kelompok. Ada etnik Jawa, Sunda, Minang, dan lain-lain, mereka yang duduk dalam pemerintahan di ibukota Propinsi Jawa Barat, mayoritas adalah orang Sunda. Sementara itu masih ada tokoh-tokoh dari suku lain. Ada dugaan terjadi konflik antar etnis...

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang dalam tataran praktis terdiri atas empat tahap. Pertama, heuristik, yaitu proses mencari dan mengumpulkan data. Proses ini dilakukan di perpustakaan dan di lapangan.

Kedua, kritik ekstern yaitu kritik terhadap sumber data untuk menentukan otentisitas sumber, dan kritik intern terhadap sumber data untuk menentukan kredibilitas sumber. Ketiga adalah interpretasi atau penafsiran atas rangkaian data yang telah dikritik. Terakhir adalah historiografi yaitu penulisan sejarah yang merupakan laporan hasil penelitian.

Dalam upaya untuk mengarahkan penelitian ini, khususnya untuk melakukan seleksi, klasifikasi, dan analisis atas rangkaian fakta, dipergunakan kerangka pemikiran teoretik dengan meminjam teori dan konsep sosiologi-politik (Lloyd, 1986; Kartodirdjo, 1992)

Situasi Politik Awal Kemerdekaan

Untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang baru itu, diperlukan seorang presiden yang akan memimpin negara ini. Untuk itulah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Mohamad Hatta, mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang ini diputuskan antara lain dua hal penting yaitu pengesahan UUD 45, pemilihan presiden, dan wakil presiden.

Dalam Sidang PPKI yang pertama dilangsungkan pada hari Sabtu, 19 Agustus 1945. R. Oto Iskandar di Nata mengusulkan Ir. Soekarno sebagai presiden RI pertama dan Drs. Mohamad Hatta sebagai wakilnya. Usul itu secara aklamasi disetujui sidang. (Bahar et al., 1995: 445-446)

Selanjutnya Presiden Soekarno membentuk panitia kecil untuk merencanakan pembentukan kementerian. Setelah melalui perdebatan cukup panjang dan alot, hasilnya adalah dibentuk 12 kementerian ditambah sejumlah menteri negara, R. Oto Iskandar di Nata diangkat menjadi salah seorang Menteri Negara, yang nantinya bertugas mengurus keamanan dan pertahanan

Dalam Sidang PPKI kedua, R. Oto Iskandar di Nata dengan sebuah panitia kecil telah mengajukan usulan pembentukan tentara kebangsaan. Usulan ini ternyata diterima secara aklamasi oleh sidang. Untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian, Presiden Soekarno menunjuk R. Oto Iskandar di Nata, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Abdul Kadir. Abdul Kadir ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kecil ini. Dalam rapat PPKI tanggal 20 Agustus 1945, diputuskan tiga hal penting yaitu dibentuknya Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat. (Bahar, et al., 1995: 462-463)

Sebagian besar pemuda, terutama bekas anggota PETA, KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger*, tentara Kerajaan Hindia Belanda), dan Heiho membentuk BKR di daerah masing-masing, termasuk di Bandung.

Sebagian pemuda, yang pada jaman Jepang telah membentuk kelompok-kelompok politik, yang berperan besar dalam mencetuskan proklamasi kemerdekaan, tidak puas dengan BKR. Para pemuda ingin pemerintah mendirikan tentara nasional, tetapi tidak mendapat tanggapan mereka yang tidak mau bergabung dalam BKR, akhirnya mereka membentuk badan-badan perjuangan,

**Peristiwa Terbunuhnya Menteri Negara Oto Iskandar di Nata, Desember 1945
(Nina Herlina Lubis)**

misalnya: Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Hisbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO), Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), Inilah yang dikenal sebagai lasykar rakyat. (Smail, 1964: 57)

Konflik Internal: Diplomasi versus Perjuangan

Para pemuda, baik yang tergabung dalam BKR maupun laskar rakyat, yang ingin menegakkan kedaulatan yang sesungguhnya dari negara yang baru merdeka itu, berusaha merebut persenjataan dari pihak Jepang, menduduki gedung-gedung penting. Bentrokan dan pertempuran terjadi di mana-mana. Di Bandung, perebutan senjata meningkat mulai akhir September hingga bulan Oktober 1945. Komandan Pasukan Jepang di Bandung, mendatangi R. Oto Iskandar di Nata, untuk menyampaikan bahwa banyak senjata Jepang yang direbut atau dicuri oleh para pemuda. Ada informasi juga yang menyebutkan bahwa senjata itu malahan diberikan oleh tentara Jepang sendiri atau mereka membantu mengambil senjata dari gudang. Komandan Jepang menganggap bahwa hal ini menyulitkan pihak Jepang di mata Sekutu karena mereka tidak diizinkan menyerahkan senjata kepada pihak Indonesia, mereka harus menjaga *statusquo*. Komandan pasukan Jepang itu mengusulkan kepada R. Oto, agar tangsi-tangsi tentara Jepang itu dijaga di luar oleh para pemuda, sementara tentara Jepang tetap tinggal di dalam tangsi. Rupanya R. Oto tertarik dengan usul itu dan berjanji kepada Komandan Jepang tersebut untuk membicarakan usul itu dengan Suhari, yang bertanggungjawab atas keselamatan Kota Bandung. Ternyata usul itu tidak bisa diterima, karena akan timbul kesulitan bila para pemuda yang ingin mengambil senjata harus berhadapan dengan para pemuda yang menjaga di depan tangsi. (Smail, 1964: 58-59).

Perebutan senjata dari pihak Jepang bahkan pembunuhan terhadap tentara Jepang terus juga terjadi. Dalam biografi Ir. Ukar (1995: 72) disebutkan bahwa para pemuda meminta tolong kepada R. Oto Iskandar di Nata, untuk menghubungi pihak Jepang, agar mau menyerahkan senjata kepada para pemuda. Menurut Smail (1964: 57), pada awal Oktober 1945, tiga orang pejabat pemerintah, yaitu R. Oto, Ir. Ukar, dan Puradireja, mendatangi Mayjen Mabuchi, agar menyerahkan senjata pasukan Jepang secara damai. Paling sedikit pertemuan itu dilakukan tiga kali. Mengapa R. Oto yang diminta untuk negosiasi ini? Hingga saat itu, R. Oto selaku Menteri Negara tanpa portopolio, menangani urusan militer di tingkat pusat, jadi seperti Menteri Pertahanan. Saat itu, R. Oto lebih banyak aktif di Bandung, di tempat asalnya.. Puradireja saat itu adalah Residen Priangan, sementara Ir. Ukar adalah Wakil Walikota Bandung dan aktif di Barisan Pelopor. Ir Ukar juga adalah Wakil Ketua KNI Keresidenan Priangan. Ketiga orang ini adalah tokoh-tokoh Paguyuban Pasundan.

Diduga hasil diplomasi ini menghasilkan suatu persetujuan bahwa penyerahan senjata itu akan dilakukan berangsur-angsur kepada pihak yang berwenang di pihak republik. Tidak ada bukti yang jelas bahwa hal ini

dilaksanakan oleh pihak Jepang.(Poesponegoro dan Notosusanto, 1993⁶: 104). Para pemuda yang tidak menyukai diplomasi yang berjalan lambat tidak sabar lagi. Mereka melanjutkan usaha perampasan senjata, misalnya saja perebutan pabrik senjata di Kiaracandong, penyerbuan ke Lapangan Terbang Andir tanggal 8 Oktober 1945 hingga pasukan Jepang di sana menyerah. (Smail, 1964: 60-63; Nasution, 1992² : 279-280).

Di sini tampak jelas, bahwa para pejabat pemerintahan di daerah, yang dahulunya para politisi pergerakan nasional, sangat dekat hubungannya dengan para politisi di Jakarta. Mereka lebih mengutamakan diplomasi daripada perjuangan bersenjata, sesuai dengan kebijakan di pusat dan berpegang kepada pada hukum yang berlaku. Ini berarti harus mematuhi apa yang sudah diputuskan secara internasional, yaitu harus ikut menjaga *status quo* hingga Sekutu datang. Bisa dipastikan, bahwa kebijakan para pejabat pemerintah ini bertentangan dengan keinginan para pemuda yang tergabung dalam lasykar perjuangan..Itulah sebabnya beberapa pemimpin sering dicap sebagai "kolaborator" Jepang. Hal ini juga, mungkin yang menjadi salah satu penyebab terjadinya peristiwa penculikan terhadap para pejabat pemerintah, termasuk R. Oto Iskandar di Nata.

Suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1945, menjadi catatan sejarah yang tragis. Pada pagi hari itu, sejumlah massa yang agresif mengepung markas *Kempetai* (polisi rahasia) Jepang di Bandung Utara dan mereka mulai menyerang markas. Ini dianggap sebagai aksi spontan karena tidak ada bukti keterlibatan BKR ataupun polisi seperti yang terjadi pada serangan di Lapangan Andir. Ketika situasi semakin gawat, pihak Jepang memanggil Suhari, Komandan BKR Kota dan beberapa pejabat pemerintah, untuk bermusyawarah. Saat masuk ke dalam gedung, mereka ditodong dengan bayonet agar menyerah dan orang Jepang kemudian memaksa mereka untuk menghentikan serangan massa dan menyampaikan kepada massa bahwa senjata akan diserahkan kemudian setelah negosiasi selesai.

Siang itu juga, Suhari dan beberapa temannya diminta naik ke atas tank dan keliling kota untuk menyerukan agar para pemuda menghentikan serangan terhadap pasukan Jepang. Tanpa mereka ketahui, pada waktu yang sama tentara Jepang sendiri menyerbu Kantor KNI Keresidenan dan menyerbu Markas-markas BKR. Pada malam harinya tentara Jepang membersihkan sisa-sisa BKR yang masih bertahan. Keesokan harinya, pasukan Jepang memasang barikade di seluruh jalan masuk ke kota. Akhirnya, Jepang berhasil mengontrol seluruh Kota Bandung.(Poesponegoro dan Notosusanto, 1993⁶ : 121-123; Smail, 1964: 64).

Para pemuda merasa terhina dengan bencana 10 Oktober 1945 ini dan mereka menyalahkan para pejabat pemerintah. Gara-gara mereka dianggap bersikap lembek, kompromistis, akhirnya terjebak dalam strategi Jepang yang sangat merugikan perjuangan mereka. Inilah yang diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya penculikan terhadap R. Oto Iskandar di Nata, dan tiga pejabat pemerintah lainnya.

Peristiwa Penculikan

R. A Soekirah, menuliskan dalam catatan sebuah buku catatan kecil, bahwa pada tanggal 26 Oktober, bahwa R. Oto Iskandar di Nata berangkat ke Jakarta. Selanjutnya, Ny.Oto mencatat bahwa pada tanggal 31 Oktober 1945 terjadi penculikan terhadap suaminya, kemudian tanggal 5 Nopember 1945, Ny.Oto diberitahu oleh seseorang di Jakarta, bahwa suaminya tidak ada.

Menurut keterangan Keluarga Oto, mereka tidak mengetahui secara tepat bagaimana duduk perkara yang sesungguhnya. Bisa dipahami, karena saat itu anak-anak yang tinggal di rumah masih kecil. Sementara itu putera tertua, Sentot Iskandar di Nata, ikut berjuang sebagai Komandan Batalyon dan puteri yang sudah dewasa, Martini, ikut berjuang sebagai anggota palang merah. Saksi mata, seorang pemuda bernama Kiwan, yaitu pembantu yang tinggal di Jakarta pun, tidak bisa dikonfirmasi karena tidak diketahui lagi apakah ia masih hidup atau tidak, karena setelah peristiwa itu, ia pergi.

Beberapa waktu kemudian, R.A. Soekirah, menerima surat dari suaminya, tertanggal 31 Oktober 1945. Tidak jelas siapa yang menyampaikan surat ini ke Bandung. Dalam surat itu. R. Oto menyatakan bahwa dirinya sedang mendapat cobaan dari Tuhan karena difitnah oleh orang lain. Dalam surat itu tidak disebutkan siapa yang telah memfitnahnya. Rupanya surat itu memang surat terakhir dari R. Oto Iskandar di Nata untuk keluarganya karena sejak itu tidak pernah ada kabar-berita lagi yang sampai ke Jalan Kaca-kaca Wetan, baik melalui telepon maupun melalui surat.

Sebuah berita resmi, akhirnya diterima menjelang akhir bulan Desember 1945, yang menyatakan bahwa R. Oto Iskandar di Nata telah menjadi korban "Lasykar Hitam" di Pantai Mauk, Tangerang. Tidak ada penjelasan pasti siapa pembunuhnya.

Ternyata yang menjadi korban penculikan itu bukan R. Oto Iskandar di Nata saja. Paling tidak, ada tiga orang pejabat lain yang ikut diculik, yaitu Residen Priangan Puradireja, Ir. Ukar Bratakusumah, yang baru saja menjadi Walikota Bandung, dan Niti Sumantri., Ketua KNI Keresidenan Priangan.(Suwangsa dan Abidin, 1995: 79-93), Korban penculikan yang tiga orang ini ternyata selamat setelah beberapa bulan hilang. Di samping itu ada pula beberapa pejabat polisi yang ikut diculik.

Dalam biografinya, Ir Ukar Bratakusumah menjelaskan bahwa ia diculik oleh orang-orangnya Sutoko, dari lasykar rakyat yang kelak menjadi Perwira Staf Siliwangi. Ir. Ukar dibawa ke Surabaya, kemudian dipindahkan ke Yogyakarta, tanpa diberitahu apa alasan penculikan itu. Setelah dua bulan di tangan para penculik yang berpindah-pindah tangan, baru pada bulan Januari 1946 Ir. Ukar dibebaskan. Menurut cerita isteri Ir. Ukar, setelah penculikan terjadi, Sutoko datang ke rumah menginterogasi isteri Ir. Ukar tentang hubungan suaminya dengan Kusna Puradireja. Dari cerita isterinya, dan setelah kembali ke Bandung, bertemu dengan Sutoko, Ir Ukar berkesimpulan bahwa penculikan terjadi karena salah sangka. Sutoko mengetahui bahwa Ir. Ukar pernah bertemu dengan Kusna

Puradireja, tokoh NICA dan mengira bahwa Ir. Ukar telah terpengaruh oleh Belanda. Dalam biografinya itu, Ir. Ukar mengklarifikasi bahwa memang benar bahwa Ir. Ukar pernah bertemu dengan tokoh pribumi pro-NICA itu, tetapi dalam pertemuan itu justru ia berdebat dengannya karena jelas-jelas berbeda prinsip. Kakak Ir. Ukar, yaitu Rd. Ema Bratakusumah dan pasukan Barisan Pelopor sangat marah mendengar Ir. Ukar diculik. Mereka mempersiapkan pasukan. Duyeh, Komandan Barisan Banteng Kota menangkap Sutoko dan Suparno, orang yang menculik Ir. Ukar. Ketika Ir. Ukar dipulangkan ke Bandung, Sutoko menyatakan penyesalannya atas tindakan terburu-buru itu. (Wawancara dengan Ir. Ukar Bratakusumah, 20-2-2002 di Jakarta). Katanya, tokoh-tokoh ini diculik karena dikhawatirkan akan menyeberang ke pihak Belanda. (Keterangan Ny. Dra. Otje Djundjungan, 24 Mei 2002).

Korban-korban penculikan seperti ini yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, ternyata banyak, dan kebanyakan tidak bisa dilacak. Tidak salah bila ada pepatah mengatakan: revolusi selalu memakan anak-anaknya. Masalahnya sekarang adalah siapa sesungguhnya yang menculik R. Oto Iskandar di Nata?

Ada berbagai keterangan yang simpang-siur tentang siapa yang menculik Menteri Negara dalam kabinet RI pertama ini. Pihak keluarga tidak ada yang mengetahui siapa yang menilpon R. Oto, agar ia ke Jakarta. Puteri R. Oto, Ny. Atih Amini, yang pada tahun 1945, berusia 12 tahun, menuturkan bahwa waktu itu, ia adalah anak terbesar yang ada di rumah. Seingatnya, ayahnya waktu itu baru saja datang dari Jakarta. Belum lama beristirahat, ayahnya mendapat tilpon bahwa ia harus ke Jakarta. Tidak jelas siapa yang menilponnya. Lalu diingatnya pula bahwa sekitar dua minggu sebelumnya, malam-malam ia terbangun karena rumah gelap. Ketika ia berusaha menyalakan lampu, ayahnya melarang, katanya bahaya. Waktu itu ia tidak mengerti mengapa ayahnya mengatakan bahaya. Lalu ayahnya menyuruh gadis kecil itu melihat dari balik jendela ke halaman rumah. Ternyata di sana ada pemuda-pemuda yang katanya dari lasykar, lalu lalang seakan mengepung rumah. Gadis kecil yang tidak tahu apa-apa itu, benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan ayahnya itu hal yang diingatnya kemudian, ayahnya memang jadi berangkat ke Jakarta setelah menerima tilpon itu.

Menurut penuturan puteri-puterinya yang lain, ibu mereka pernah bercerita sebelum wafat pada tahun 1986, bahwa waktu ayahnya itu akan berangkat ke Jakarta, R. Oto mengatakan kepada isterinya bahwa mungkin saja ia tak akan kembali, atau akan menjadi korban. Kekhawatiran itu muncul mengingat kejadian-kejadian beberapa hari terakhir, seperti pengintaian atas rumah mereka di Kaca-kaca Wetan itu dan juga adanya isu yang beredar waktu itu. Menurut satu keterangan, dalam waktu beberapa hari menjelang pertengahan Oktober 1945 itu, beredar kabar bahwa sejumlah tokoh di Bandung telah masuk dalam daftar yang harus diculik. Tidak jelas siapa yang membuat daftar itu. Hanya saja, orang-orang yang akan diculik itu saling mengingatkan dan berjaga-jaga atau harus pergi meninggalkan rumah. Kalau tidak bisa pergi pun harus tampak seolah

**Peristiwa Terbunuhnya Menteri Negara Oto Iskandar di Nata, Desember 1945
(Nina Herlina Lubis)**

tidak ada di rumah dan malam hari lampu rumah harus dimatikan agar seolah tak ada orang.

Ny. Sukanda Bratamanggala menuturkan bahwa sehari sebelum R. Oto Iskandar di Nata berangkat ke Jakarta, terlebih dahulu ia datang kepada Sukanda Bratamanggala Komandan "Front Bandung Utara" di Lembang. Ketika itu R. Oto menceritakan bahwa ia diminta datang ke Jakarta atas perintah Presiden Soekarno. Hanya tidak dijelaskan siapa yang menilpon dari Jakarta itu. Sukanda mencoba mencegah agar R. Oto jangan pergi ke Jakarta mengingat situasi yang genting akan tetapi, R. Oto bersikeras akan pergi juga karena ia harus disiplin terhadap atasan. Akhirnya Sukanda menawarkan untuk mengawal ke Jakarta, tetapi tawaran ini pun ditampiknya. (Wawancara dengan Ny. Emi Kartini Bratamanggala, 24-5-2002 di Bandung).

Pengadilan tahun 1959

Selama bertahun-tahun orang seakan melupakan peristiwa tragis yang menimpa R. Oto Iskandar di Nata. Perang kemerdekaan yang terjadi hingga tahun 1949, hingga diakuinya kedaulatan Republik Indonesia, benar-benar telah menyibukkan semua orang. Presiden Soekarno, sempat memerintahkan Mr. Kasman untuk mencari R. Oto Iskandar di Nata ketika Menteri Negara ini selama dua bulan hilang tanpa kabar berita. Menurut salah satu sumber, Sukanda Bratamanggala, Komandan Batalion di "Front Bandung Utara", ketika itu ditugaskan ke Banten. Di Mauk, ia mendapat keterangan dari seorang anggota lasykar di sana bahwa R. Oto dengan seorang lainnya pernah ditahan dalam ruang tahanan di sana. Kemudian R. Oto dibawa ke pantai oleh seseorang dan dibunuh di sana. Mayatnya kemudian dibuang ke laut. Berdasarkan ciri-ciri tawanan yang dibunuh itu, dipastikan bahwa ia adalah R. Oto Iskandar di Nata.

Setelah dipastikan tentang tewasnya R. Oto Iskandar di Nata di Mauk itu, tidak pernah diberitakan bahwa pemerintah melakukan penyelidikan lebih jauh tentang mengapa dan bagaimana Pak Oto terbunuh, siapa pula pembunuhnya. Dalam situasi revolusi agak sulit untuk memastikan mengapa pemerintah tidak melakukan upaya maksimal untuk mengusut perkara ini. Kita mengetahui bahwa hingga tahun 1949, adalah periode perjuangan menegakkan kedaulatan yang sesungguhnya yang menyibukkan pemerintah.

Barulah pada tahun 1959, digelar sidang pengadilan yang menghadapkan Mujitaba, seorang polisi yang didakwa membunuh R. Oto Iskandar di Nata di Pantai Mauk Tangerang, 14 tahun yang telah lewat. Prof. Dr. Priyatna Abdurrajsid, S.H., Jaksa yang bertugas dalam sidang pengadilan tahun 1959 itu, dalam biografinya menjelaskan bahwa pada tahun 1959, ia ditugaskan oleh Mr. Sunaryo, untuk memeriksa tersangka pembunuh R. Oto Iskandar di Nata. Dalam persidangan diketahui bahwa Menteri Oto dibawa dari Bandung ke Jakarta, kemudian dibawa ke Mauk, Tangerang dan dibunuh oleh seorang polisi bernama Mujitaba. Mantan Jaksa tersebut, menjelaskan bahwa pada persidangan itu yang bertindak sebagai hakim adalah Rafli Rasjad Dari persidangan Jaksa Priyatna

mengetahui bahwa Mujitaba mengaku membunuh R. Oto Iskandar di Nata karena ia mendapat perintah tidak jelas dari siapa. Menurut Jaksa ini, berdasarkan pengakuan Mujitaba, ia membunuh R. Oto, tanpa mengetahui siapa yang dibunuhnya itu. Ia hanya diberitahu oleh lasykar yang membawa korban, bahwa orang yang harus dibunuhnya itu adalah "mata-mata musuh", yang sebelumnya dituduh menyerahkan Bandung kepada Belanda. Mujitaba baru tahu beberapa waktu kemudian, bahwa yang dibunuhnya itu, adalah Menteri Negara R. Oto Iskandar di Nata. Sebelum persidangan diakhiri, Jaksa Priyatna meminta tambahan persidangan karena tersangka memberikan keterangan yang menyangkut nama pejabat yang masih aktif dalam pemerintahan waktu itu, tetapi, permintaan itu tidak dikabulkan. Persidangan pun berhenti sampai di situ saja. Jaksa Priyatna pernah ingin mengetahui lebih lanjut pengakuan Mujitaba yang tidak tuntas itu, tetapi ia tidak tahu harus ke mana mencari terdakwa itu karena setelah Mujitaba menjalani hukumannya selama 15 tahun di LP Cipinang, tidak diketahui lagi di mana ia tinggal kemudian. (Wawancara dengan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, S.H., 20-2-2002 di Jakarta; Ramadhan, 2001:160).

Smail (1964:71), menyimpulkan bahwa berdasarkan pengadilan yang dilakukan tahun 1959. R. Oto diculik di Jakarta oleh sebuah badan perjuangan dan kemungkinan ada kaitan dengan soal peristiwa di Bandung. Berita tentang persidangan ini dimuat di surat kabar *Sin Po* tahun 1959.

Mengenai kapan sesungguhnya R. Oto Iskandar di Nata dibunuh? Tidak ada keterangan yang pasti. Dalam berita resmi, disebutkan bahwa Menteri Negara "Pertahanan" itu, tewas tanggal 20 Desember 1945. Jadi, selama satu setengah bulan lebih, sejak kepergiannya dari Bandung tanggal 26 Oktober 1945, R. Oto dibawa ke mana? Dengan memperhatikan bahwa surat terakhir yang ditulis adalah tanggal 31 Oktober 1945, berarti R. Oto tidak jelas berada di mana sejak 1 Nopember hingga 20 Desember 1945.

Seperti sudah dijelaskan, konflik antara laskar yang lebih memilih perjuangan daripada diplomasi dengan pihak politisi yang menjadi pejabat pemerintah terjadi sejak sebelum Jepang menyerah. Beberapa peristiwa yang telah diuraikan di atas menunjukkan implikasi konflik ini. Menurut Smail (1964: 69), semuanya ini, terutama peristiwa 10 Oktober 1945, telah menyebabkan terjadinya peristiwa penculikan tersebut.

Di satu pihak, para pejabat pemerintah telah didiskreditkan dengan peristiwa 10 Oktober 1945. dan akibat peristiwa ini kekuasaan mereka untuk mengontrol situasi menjadi lebih terbatas. Di lain pihak, para pemuda, merasa frustrasi dan terhina, perjuangan mereka hancur dalam sekejap hanya dengan sepasukan kecil Kempetai dan mereka diejek oleh para pemuda dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berhasil melucuti tentara Jepang. Ejekan itu mencapai puncaknya, ketika dalam Kongres Pemuda di Yogyakarta tanggal 12 Nopember 1945, para pemuda Jawa Barat disebut sebagai "pemuda peuyeumbol". (Smail, 1964: 70).

Para pemuda melampiaskan kemarahannya dengan membuat aksi kepada pihak yang disalahkan. Terjadilah penculikan-penculikan tersebut. Smail (1964:

70), juga telah mencatat, bahwa para pejabat yang diculik itu, semuanya orang Sunda. Para penculik itu juga menyalahkan para pejabat yang telah mempersenjatai pimpinan BKR, Suhari, Sukanda, dan beberapa lainnya, yang juga orang Sunda. Masalah etnik ini tidak cukup signifikan untuk disebut sebagai salah satu faktor ketidaksenangan para penculik, tetapi tidaklah dapat diabaikan Suatu kenyataan, bahwa para politisi yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan di Kota Bandung, kebanyakan adalah orang Sunda. Jangan lupa bahwa penculik Ir. Ukar Bratakusumah adalah Sutoko yang jelas bukan orang Sunda. Hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Sutoko juga yang mendalangi penculikan R. Oto? Tidak ada kesaksian langsung dan tidak ada dokumen tertulis yang akurat untuk membuktikan hal ini timbul pertanyaan lainnya adalah, mengapa hanya tiga orang lain yang dilepas? Mengapa R. Oto tidak?.

Pada saat itu, sebagian kalangan elite Sunda, melihat peristiwa penculikan tokoh-tokoh Sunda itu sebagai upaya penyingkiran orang Sunda dari jabatan pemerintahan. R. Oto saat itu adalah Menteri Negara. Melihat *track record*-nya ia juga tidak bisa disebut sebagai tokoh lokal, apalagi tokoh yang etnosentris. Lihat saja, sejak muda ia sudah bergiat di Budi Utomo yang berorientasi budaya Jawa, ia juga aktif membela rakyat di Pekalongan yang notabene orang Jawa, dan lebih jelas lagi sikap nasionalisnya ini, istrinya adalah keturunan priyayi Jawa. Keterlibatannya dalam *Volksraad*, BPUPKI, dan PPKI lebih menunjukkan bahwa ia adalah tokoh nasional, yang kebetulan saja orang Sunda. Jadi, apakah si penculik masih tetap menganggap R. Oto mewakili etnik Sunda? Sebenarnya tidaklah tepat kalau masalah kesukuan R. Oto dijadikan alasan oleh "musuh" atau orang yang tidak senang kepadanya untuk menghabisinya.

Kalaupun para pemuda tidak suka melihat para pemimpin yang terlalu dekat hubungannya dengan Jepang, bisa saja dipahami. Sejak zaman Jepang R. Oto dan juga beberapa di antara para pemimpin nasional lainnya, tampak dekat dengan Jepang, demi kelangsungan perjuangan. Bagaimana para penculik, yang tentunya tidak kenal dekat dengan R. Oto, itu bisa memahami bahwa R. Oto bukan "kolaborator" Jepang, sedangkan teman-teman dekat R. Oto pun kadang tidak mengerti mengapa R. Oto seolah-olah begitu "kooperatif" dengan penjajah dan baru setelah lama mengenal R. Oto, mereka menyadari bahwa sesungguhnya R. Oto bersikap "baik" kepada pemerintah kolonial demi untuk mengambil "sesuatu" dari penjajah itu yang bermanfaat bagi bangsa ini ketika telah merdeka. Sikap anti kolonialnya sangat nyata, ketika pada masa akhir penjajahan Hindia Belanda, R. Oto menolak secara tegas ketika ia diajak untuk "lari" ke Australia melalui Cilacap. Padahal ia dijanjikan jabatan menggiurkan kalau mau "lari" bersama mereka. Memang ada beberapa orang temannya yang mau ikut ke pihak sana. (wawancara dengan Ir. Ukar Bratakusumah, 20-2-2002 di Jakarta dan wawancara dengan Bapak Rochdi Partaatmadja, 12-5-2002 di Bandung).

SIMPULAN

Peristiwa pembunuhan R. Oto Iskandar di Nata merupakan masalah yang sangat kompleks. Banyak faktor yang ikut mendukung terjadinya peristiwa itu, meskipun akhirnya tidak bisa ditemukan secara pasti siapa pembunuhnya. Ada berbagai faktor yang bisa dijelaskan sehubungan dengan peristiwa ini. Pertama, adalah sikap kooperatif dengan penjajah yang ditunjukkan R. Oto Iskandar di Nata sangat nyata. Kooperasi terpaksa dilakukan guna memperoleh bekal untuk dipergunakan pada masa Indonesia telah merdeka, tetapi sikap seperti itu ternyata merugikan dirinya karena para pemuda pejuang menganggap sikap itu tidak bisa dimaafkan. Faktor kedua, R. Oto Iskandar di Nata mengalami konflik kepentingan. Sebagai Menteri Negara ia adalah aparat pemerintah pusat yang harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Ketika ia datang di Bandung, saat terjadi pergolakan antara para pemuda dan pihak Jepang, ia diminta oleh para pemuda untuk membantu mereka mendapatkan senjata dari Jepang. Ini tentu saja menyalahi kesepakatan antara sekutu dengan Jepang yang harus diamankan oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, demi menjalankan kebijakan pusat, para pemuda yang tergabung dalam lasykar tidak puas. Kekecewaan yang dialami para pemuda bertumpuk dengan adanya tindakan sekutu yang merugikan mereka. Kekecewaan ini dilampiaskan kepada pihak-pihak yang dianggap menciptakan situasi yang merugikan mereka itu, maka penculikan pun terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Saafroedin; Kusuma, Ananda B., dan Hudawati, Nannie. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Coser, Lewis. 1956. *The Functions of Social Conflict*. The Free Press, New York
- Bottomore, Tom. 1974. *Elites and Society*, Penguin Books.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia, Jakarta.
- KH., Ramadhan. 2001. *H. Priyatna Abdurrajsid; Dari Cilampeni ke New York Mengikuti Hati Nurani*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kosim, E. et al. 1981. *Biografi dan Perjuangan R. Oto Iskandar di Nata*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Lloyd, Christopher. 1986. *Explanation in Social History*, Basil Blackwell Inc., New York.

**Peristiwa Terbunuhnya Menteri Negara Oto Iskandar di Nata, Desember 1945
(Nina Herlina Lubis)**

- Mosca, Gaetano. 1939. *The Ruling Class*, Mc.-Graw Hill Book-Company, New York.
- Nasution, A.H. 1995. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 1,2, Angkasa, Bandung.
- Poesponegoro, Marwati Djoened; Notosusanto, Nugroho. ed. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*. VI., Balai, Pustaka Jakarta.
- Smail, John R.W. 1964. *Bandung in the Early Revolution 1945-1946*, Cornell University, Ithaca-New York.
- Soekirah, Ny.R.A. 1945. (sebuah buku catatan kecil tanpa judul).
- Soewono, Aang. 1997. *Laporan Kegiatan Pembangunan Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten DT II Bandung*.
- Suharto. 2002. *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942; Profil Pergerakan Etno-nasionalis*, Satya Historika, Bandung.
- Sutjiatiningsih, Sri. 1982/1983. *Oto Iskandar di Nata*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud, Jakarta.
- Suwangsa, Aat dan Abidin, Zaenal. 1995. *Ir.R.H. Ukar Bratakusumah; dari Jaman Penjajahan Belanda hingga Jaman Pembangunan*, Yayasan Kudjang, Bandung.
- Turner, Jonathan H. 1978. *The Structure of Sociological Theory*, The Dorsey Press, Ontario.